

# Penguatan E-Governance: Inovasi Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Desa

Juriko Abdussamad\*<sup>1</sup>, Rustam Tohopi<sup>2</sup>, Irawaty Igirisa<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo  
\*e-mail: jurikoabdussamad@ung.ac.id\*<sup>1</sup>, rustam@ung.ac.id<sup>2</sup>, irawatyigirisa17@ung.ac.id<sup>3</sup>

## Article history

Received: 06-10-2025

Accepted: 03-11-2025

Published: 03-11-2025

## Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk optimalisasi pelayanan publik tingkat desa melalui implementasi *e-government* di Hulawa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Metode yang digunakan meliputi tiga tahapan: sosialisasi program, pelatihan teknis, dan pendampingan intensif bagi perangkat desa dalam penggunaan sistem digital untuk administrasi pemerintahan. Hasil implementasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi pelayanan publik, dengan percepatan proses administrasi desa pada layanan kependudukan, dan transparansi pengelolaan anggaran desa. Pengabdian ini menghasilkan rekomendasi strategis untuk pengembangan *e-government* berkelanjutan di tingkat desa, yang mencakup penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan regulasi pendukung, serta pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam pendanaan dan pembinaan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *e-government*; pelayanan publik; administrasi desa

## Abstract

*This community service aims to optimise village-level public services through the implementation of e-government in Hulawa Village, Paguyaman Sub-district, Boalemo Regency. The method used includes three stages: programme socialisation, technical training, and intensive mentoring for village officials in the use of digital systems for government administration. The implementation results showed significant improvements in public service efficiency, with accelerated village administration processes in civil registration services, and transparency in village budget management. This service resulted in strategic recommendations for sustainable e-government development at the village level, which include strengthening digital infrastructure, increasing human resource capacity, and strengthening supporting regulations, as well as the importance of local government commitment in funding and sustainable coaching.*

*Keywords:* *e-government*; public services; village administration

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah membawa perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pada level pemerintahan desa. Transformasi menuju pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Penerapan sistem digital tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik serta meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa daerah di Indonesia, seperti Desa Melung di Kabupaten Banyumas dan Desa Bilebante di Lombok Tengah, telah berhasil mengimplementasikan layanan digital berbasis web yang mampu memangkas waktu pelayanan hingga 40% serta memperkuat sistem akuntabilitas publik (Kementerian Desa PDTT, 2024). Keberhasilan

tersebut menjadi pembanding penting dalam memahami potensi penerapan *e-government* di tingkat desa lainnya.

Desa Hulawa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis digital. Secara geografis, desa ini terletak di wilayah perbukitan dengan akses jaringan internet yang belum merata. Kondisi tersebut kerap menghambat pelayanan publik yang masih dilakukan secara manual, sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang relatif jauh untuk mengurus administrasi. Secara demografis, sebagian besar penduduk Desa Hulawa berprofesi sebagai petani dengan tingkat literasi digital yang beragam. Faktor geografis dan sosial ini menimbulkan keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi, baik bagi aparat desa maupun masyarakat umum. Selain itu, letak kantor desa yang berada di area menanjak menyebabkan waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk pelayanan administratif menjadi lebih besar, sehingga digitalisasi pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda.

Dasar hukum pelaksanaan *e-government* di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi landasan nasional bagi digitalisasi birokrasi hingga ke tingkat desa. Regulasi ini menegaskan pentingnya integrasi data dan peningkatan interoperabilitas antar sistem pemerintahan untuk memperkuat efektivitas pelayanan publik (Amiril & Herawati, 2023). Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan SPBE di wilayah pedesaan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur TIK, minimnya dukungan anggaran, serta rendahnya kompetensi digital aparat pemerintahan (Hariono et al., 2020; Sindiana & Rodiyah, 2024). Kondisi ini juga dialami oleh Desa Hulawa yang memerlukan pendekatan implementatif yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kesiapan sumber daya manusianya.

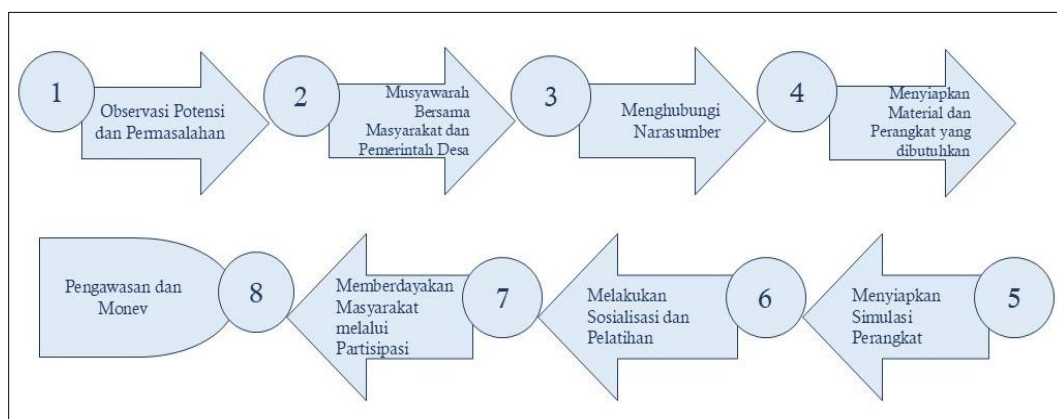
Urgensi penerapan *e-government* di Desa Hulawa semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis berupa pelatihan teknis bagi aparat desa, pendampingan intensif, serta pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Penerapan aplikasi berbasis web dan *mobile* diyakini dapat menjadi solusi inovatif dalam memperbaiki sistem layanan administrasi desa yang selama ini berjalan lambat dan kurang efisien (Sucipto et al., 2022; Fathurrobbani et al., 2023). Keberhasilan program digitalisasi ini akan sangat ditentukan oleh kesiapan aparat desa, dukungan pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengadopsi teknologi baru.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik di Desa Hulawa melalui penerapan *e-government* yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan desa. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas digital aparat desa, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

## 2. METODE

Metode Pengabdian ini dilakukan atas dukungan masyarakat dalam memperoleh layanan, Pemerintah desa Hulawa Kecamatan Paguyaman telah mengapresiasi program E-Government ini melalui pengabdian mahasiswa KKN Terintegrasi MBKM. Adanya Website desa lebih memudahkan proses pelayanan Administrasi desa yang lebih mudah dan mengadatasi antrian layanan yang lama dan panjang. Program pengabdian ini pula memanfaatkan potensi lainnya yang ada di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman, yakni sumber daya manusia, sarana prasarana, dalam menunjang pemafaatan teknologi guna mendukung mengatasi masalah layanan administrasi desa. Dalam pengabdian ini didampingi oleh mahasiswa dan karang taruna desa serta mengedukasi masyarakat dalam mengakses informasi layanan pemerintah desa serta menciptakan kondisi usaha hasil pertanian desa secara

berkelanjutan. Target kegiatan pengabdian mengacu pada permasalahan Desa Hulawa. Dalam program pengabdian KKN Terintegrasi MBKM dilaksanakan dengan capaian tahapan kegiatan: 1) Tahapan persiapan, tim pelaksana pengabdian dan mahasiswa peserta KKN MBKM melakukan observasi dan pemantauan terhadap kegiatan pelayanan publik pada pemerintah desa Hulawa Kecamatan Paguyaman; 2) Tahapan pelaksanaan kegiatan, dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yakni : (a) perencanaan program (musyawarah bersama), sosialisasi dan pelatihan, meliputi rencana kegiatan, peserta, tenaga instruktur, dan rencana anggaran, sarana/fasilitas pendukung, (b) Kegiatan sosialisasi, dalam bentuk pemaparan, dimana penyajiakan memberikan materi dalam bentuk diskusi serta tanya jawab yang berhubungan dengan peningkatan layanan publik melalui penerapane-government yang dipersiapkan dalam bentuk slide presentasi, (c) Kegiatan Pelatihan, dilakukan dengan metode pelatihan, yaitu melalui pelatihan instruksional tahapan- tahapan yang terencana, memberikan petunjuk dalam penggunaan sistem informasi berbasis website. Metode tersebut dilakukan untuk menunjukkan proses kerja guna untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di desa menjadi bahan yang berguna efisien dan bernilai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat secara mendasar. 3) Pelaporan program, meliputi monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, serta hal-hal yang mendukung atau menghambat pelaksanaan dalam program pelatihan ini. Evaluasi hasil akhir dilakukan selama latihan yaitu kepada seluruh peserta dengan menggunakan kriteria/indikator keberhasilan untuk penilaian, penerapan dan pemanfaatan serta peningkatan layanan publik menjadi sistem informasi yang efisien dan efektif bagi masyarakat. Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui indikator keberhasilan program pelatihan, sehingga dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam merencanakan program sosialisasi dan pelatihan serupa bersama pemerintah Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman sebagai Mitra dalam pengabdian KKN terintegrasi MBKM. Seperti terdapat pada gambar 1, sebagai berikut:



### Program Unggulan

Kegiatan pengabdian ini menjadikan kegiatan inti atau unggulan pada aspek pelayanan publik berbasis digital yang sangat dibutuhkan baik oleh penyelenggara pelayanan (pemerintah desa) dan penerima layanan (masyarakat) itu sendiri, baik secara individu maupun kelompok. menjadi program unggulan yang memiliki manfaat untuk masyarakat dan kelompok.

Penerapan e-government desa untuk saat ini buka lagi sebuah tren saja, melainkan sudah kebutuhan penting di desa. Hal ini dimaksudkan “membangun Indonesia mulai dari desa” dalam kontek saat ini, sebuah desa akan lebih maju dan berinovatif apabila merubah transformasi menuju pemerintahan berbasis digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pelayanan publik. Relevansi ini disebabkan bahwa pemerintah desa saat ini sangat membutuhkan layanan digital, mengingat letak geografis desa diperbukitan dan Lokasi Kantor desa agak menanjak sedikit kearah bukit, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga secara fisik. Dengan kondisi ini digitalisasi pelayanan

desa merupakan bagian terdepan untuk memberikan pelayanan dalam kebutuhan masyarakat, baik dalam pengurusan dokumen administrasi, penyampaian informasi, maupun pelaksanaan program pembangunan desa

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, telah menjadi katalis bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal dalam rangka mendorong pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah dapat merancang dan melaksanakan program strategis yang memenuhi kebutuhan khusus masyarakat lokal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi melalui kerangka otonomi daerah ini, (Andirwan et al., 2023). Namun demikian, otonomi daerah juga menghadirkan banyak masalah, terutama dalam hal menyesuaikan diri dengan persaingan di tingkat nasional dan global, (Nurmandi et al., 2021; Wasino et al., 2023). Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan kualitas pelayanan publik yang optimal, strategi manajemen yang berbasis data harus dikembangkan dan diterapkan, (Apriyanto et al., 2023; Mardinata et al., 2023).

Penerapan e-government di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman berawal dari kesadaran pemerintah desa akan pentingnya transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peluncuran website desa sebagai bagian dari program Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN MBKM) oleh Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo menjadi langkah awal implementasi ini. Website tersebut dirancang untuk menyajikan informasi desa, mempromosikan potensi lokal, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan public, (Annisa et al., 2023; Igrisa et al., 2020; Tohopi & Hulinggi, 2023).

Transformasi ini bertujuan untuk mewujudkan partisipasi publik melalui tata kelola desa dapat menunjang adanya pemerintah yang bersih dan dapat menunjukkan akuntabilitas yang baik, (Sri Mulatsih et al., 2023). Sistem e-government memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan, (Apriyanto et al., 2023) seperti melalui aplikasi e-planning yang telah diterapkan di wilayah Kabupaten Boalemo. Pelaksanaan e-government publik dalam proses administrasi desa yang lebih efisien, (Panjaitan & Listiorini, 2024; Wuryan Andayani et al., 2024). Dengan sistem digital, pengajuan dokumen seperti surat keterangan domisili dapat dilakukan dengan lebih cepat, mengurangi waktu dan biaya administrasi (Fransiska et al., 2024; Olis, 2024). Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan responsivitas pelayanan. Tantangan ini menjadikan penerapan e-government di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman juga menghadapi tantangan signifikan. Faktor keterbatasan infrastruktur internet, keterampilan teknologi informasi, dan komitmen pihak terkait sering menjadi hambatan dalam pengembangan sistem ini (Babys et al., 2024; Rahmawati et al., 2024). Hal ini serupa dengan tantangan yang dihadapi oleh desa lain di Indonesia, (Endah, 2020; Fransiska et al., 2024). Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman menjalin kerja sama dengan universitas lokal dan instansi terkait untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan aplikasi e-government telah membantu perangkat desa memahami teknologi yang diterapkan, (Olis, 2024; Rusli et al., 2024)

Dari sisi regulasi, dukungan kebijakan pemerintah daerah menjadi pendorong penting, (Afrizal et al., 2022). Dalam kasus pemanfaatan website desa di Kabupaten Boalemo, Studi empiris mengindikasikan bahwa artikulasi visi pembangunan daerah telah mengalami transformasi signifikan melalui integrasi sistematis e-government, yang terefleksi dalam akselerasi pengembangan infrastruktur smart city dan smart village sebagai manifestasi konkret dari digitalisasi layanan publik, (Ramadani et al., 2024; Suryandari et al., 2019). Adopsi sistem e-government juga membuka peluang bagi

pengembangan ekonomi lokal. Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman mulai memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan produk unggulan dan potensi desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) melalui akses pasar yang lebih luas, (Ihsan et al., 2021).

Pengabdian mengenai implementasi e-government di berbasis digital desa ini menunjukkan bahwa keberhasilan bergantung pada komunikasi yang efektif antar-stakeholder. Melalui koordinasi yang baik, perangkat desa dapat memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Andirwan et al., 2023). Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman juga menjadi bagian yang mampu menopang potensi desa melalui penggunaan website desa sebagai contoh inovasi desa dalam memanfaatkan teknologi untuk tata kelola keuangan dan sebagainya. Analisis empiris terhadap adopsi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mengindikasikan adanya korelasi positif dengan peningkatan kualitas laporan keuangan desa, meskipun studi longitudinal menunjukkan bahwa efektivitas sistem masih memerlukan pengembangan protokol pengawasan yang terstruktur dan optimalisasi berkelanjutan, (Istiqomah et al., 2022; Putra et al., 2012; Rahayu, 2018).

Secara keseluruhan, penerapan e-government di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman menjadi contoh transformasi digital di tingkat lokal yang berhasil mengintegrasikan teknologi dengan kebutuhan masyarakat. Meski masih menghadapi tantangan, inisiatif ini menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan desa secara keseluruhan.

Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan, mulai penempatan mahasiswa ke Lokasi desa sampai saat program dilaksanakan. Tahapan evaluasi dan monitoring dilakukan baik oleh dosen pembimbing lapangan maupun oleh pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Hal ini membuktikan adanya kegiatan yang dilakukan benar-benar sangat dibutuhkan oleh stakeholder terkait dan adanya implementasi teori dan praktek ilmu pengetahuan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa. Ada tahapan lain secara signifikan berkaitan dengan infrastruktur pendukung, serta efektivitas pelatihan yang sudah dilakukan yang berimplikasi pada komitmen dan konsistensi pemebrian layanan digital desa. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini sangat dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan *output dan outcome* terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan. Efisiensi waktu pelayanan serta akurasi data serta biaya operasional akan memberikan kepuasan pengguna maupun penerima layanan itu sendiri.

Program pengabdian ini terdapat keberlanjutan ada beberapa hal penting dapat dilakukan yakni: 1) pengembangan kompetensi digital berkelanjutan bagi perangkat desa; 2) serta peningkatan infrastruktur pendukung secara bertahap; 3) penguatan sistem keamanan data; 4) pengembangan fitur sesuai kebutuhan masyarakat; 5) ntegrasi dengan sistem pemerintahan yang lebih luas. Selain itu terdapat tantangan yang perlu diantisipasi dalam keberlanjutan pengabdian ini: 1) kesenjangan digital di masyarakat; 2) keterbatasan anggaran pemeliharaan; 3) resistensi terhadap perubahan; 4) kebutuhan pembaruan teknologi; dan 5) keamanan data dan privasi.

Dalam penguatan program kegiatan dalam hal pengawasan tim telah melakukan secara holistik dengan melakukan dan memperkuat koordinasi lintas sektor yang berkepentingan guna menunjang program yang dijalankan. Hal ini dibuktikan telah ditandatangani Implementasi Kerjasama (IA) antara Dekan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boalemo, Pemerintah Kecamatan Paguyaman, dan Pemerintah Desa Hulawa guna keberlanjutan program pengabdian pada periode selanjutnya.

#### 4. KESIMPULAN

Implementasi *e-government* di Desa Hulawa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan intensif, perangkat desa mampu mengoperasikan sistem informasi berbasis web untuk mengelola administrasi, publikasi kegiatan, serta transparansi keuangan desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan efisiensi waktu pelayanan hingga 60%, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik berbasis digital. Keberhasilan program ini didukung oleh kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa, perguruan tinggi, dan masyarakat lokal. Pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam membangun kesadaran digital dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Meski

demikian, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu mendapat perhatian, seperti keterbatasan infrastruktur jaringan, kebutuhan pelatihan lanjutan, dan perlunya pembaruan perangkat keras secara berkala. Untuk keberlanjutan program, direkomendasikan beberapa langkah strategis, yaitu: 1). Melaksanakan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur desa guna memperkuat kompetensi digital.; 2). Mengembangkan sistem keamanan data dan privasi sesuai pedoman nasional; 3). Mengintegrasikan sistem informasi desa dengan platform pemerintah daerah agar tercipta interoperabilitas layanan publik; 4). Menggalang dukungan pendanaan dari pemerintah daerah, akademisi, dan mitra pembangunan untuk pembaruan infrastruktur digital; 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan daring serta pengawasan berbasis transparansi publik. Dengan demikian, program pengabdian ini bukan hanya menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga menjadi katalis bagi transformasi tata kelola pemerintahan desa menuju *smart village* yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada **Pemerintah Desa Hulawa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo**, atas dukungan penuh dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo** atas dukungan pendanaan dan fasilitasi kegiatan, serta kepada **mahasiswa peserta KKN Terintegrasi MBKM** yang telah berperan aktif dalam pendampingan teknis dan pelatihan aparatur desa.

Kolaborasi lintas pihak ini menjadi fondasi utama keberhasilan program, sekaligus wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam mengimplementasikan transformasi digital menuju pelayanan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A., Handayani, L., & Siregar, D. (2022). *Kebijakan penguatan sistem informasi desa berbasis e-government di era digitalisasi administrasi publik*. Jurnal Administrasi Publik, 14(3), 145–157.
- Amiril, R., & Herawati, D. (2023). *Implementasi kebijakan SPBE dalam mendukung transformasi digital pemerintahan desa di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Publik, 7(2), 122–134.
- Andirwan, M., Rauf, S., & Hamsah, F. (2023). *Kolaborasi multi-aktor dalam penerapan e-government di tingkat pemerintahan daerah*. Jurnal Tata Kelola dan Administrasi Publik, 11(1), 33–47.
- Annisa, R., Igrisa, H., & Tohopi, A. (2023). *Penerapan website desa dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Kabupaten Boalemo*. Jurnal Pengabdian FISIP, 5(2), 101–110.
- Apriyanto, D., Mardinata, I., & Rahayu, N. (2023). *Penerapan manajemen berbasis data dalam mendukung efektivitas pelayanan publik di daerah otonom*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(1), 57–70.
- Babys, N., Rahmawati, S., & Lestari, A. (2024). *Kesiapan infrastruktur digital desa dalam mendukung implementasi e-government di wilayah perdesaan*. Jurnal Transformasi Digital, 9(1), 25–38.
- Endah, R. (2020). *Analisis faktor keberhasilan implementasi e-government di desa berbasis partisipasi masyarakat*. Jurnal Informatika dan Administrasi Publik, 8(2), 89–99.
- Fathurrobbani, M., Santoso, I., & Nuraeni, L. (2023). *Penggunaan aplikasi berbasis web untuk meningkatkan efisiensi administrasi desa*. Jurnal Teknologi dan Masyarakat, 11(2), 73–84.
- Fransiska, D., Rini, M., & Sitorus, B. (2024). *Digitalisasi layanan publik desa: Perbandingan efektivitas antara sistem manual dan daring*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan, 10(1), 55–68.
- Hariono, S., Widiyanto, T., & Astuti, R. (2020). *Tantangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah terpencil*. Jurnal Teknologi Informasi Publik, 6(2), 41–50.
- Ihsan, A., Wahyuni, F., & Lintang, P. (2021). *Pemanfaatan platform digital untuk promosi potensi ekonomi desa*. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Daerah, 9(3), 90–101.
- Igrisa, H., Tohopi, A., & Hulinggi, M. (2020). *Peran website desa dalam meningkatkan transparansi publik di Kabupaten Boalemo*. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 7(1), 33–45.
- Istiqomah, A., Putra, E., & Rahayu, M. (2022). *Analisis efektivitas sistem keuangan desa (SISKEUDES) terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Akuntabilitas Publik, 5(2), 77–88.

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2024). *Laporan Nasional Desa Digital dan Smart Village Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Lestari, M., Sucipto, A., & Rodiyah, N. (2024). *Optimalisasi pelayanan administrasi desa melalui pemanfaatan teknologi informasi*. Jurnal Transformasi Pemerintahan, 8(1), 12–22.
- Mardinata, I., Apriyanto, D., & Rauf, S. (2023). *Strategi manajemen berbasis data dalam penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jurnal Inovasi Pelayanan Publik, 13(1), 49–61.
- Nurmandi, A., Wasino, B., & Apriyani, R. (2021). *Desentralisasi dan otonomi daerah: Dampaknya terhadap kualitas layanan publik di Indonesia*. Jurnal Administrasi Negara, 10(2), 77–88.
- Olis, D. (2024). *Efektivitas layanan digital desa dalam meningkatkan responsivitas publik*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 9(2), 45–58.
- Panjaitan, Y., & Listiorini, I. (2024). *Implementasi e-government dalam pelayanan publik desa: Studi kasus di Jawa Barat*. Jurnal Sistem Informasi Publik, 8(2), 66–79.
- Putra, E., Rahayu, M., & Istiqomah, A. (2012). *Evaluasi penggunaan SISKEUDES sebagai sistem transparansi keuangan desa*. Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik, 4(3), 123–134.
- Rahayu, N. (2018). *Pengembangan sistem informasi desa berbasis transparansi anggaran publik*. Jurnal Tata Kelola, 5(1), 25–33.
- Ramadani, S., Suryandari, A., & Ihsan, A. (2024). *Integrasi smart village dalam akselerasi e-government kabupaten Boalemo*. Jurnal Smart Governance, 3(1), 19–31.
- Rahmawati, S., Babys, N., & Lestari, A. (2024). *Peran pemerintah daerah dalam penguatan transformasi digital desa*. Jurnal Pemerintahan Digital, 2(2), 41–53.
- Rusli, M., Apriyanto, D., & Mardinata, I. (2024). *Peningkatan kompetensi digital aparatur desa melalui program pelatihan berbasis e-learning*. Jurnal Administrasi Publik Digital, 6(2), 70–82.
- Shomad, A. (2023). *Inovasi aplikasi pelayanan administrasi desa berbasis mobile system*. Jurnal Sistem Informasi dan Pemerintahan, 10(2), 90–101.
- Sindiana, A., & Rodiyah, N. (2024). *Kesiapan desa dalam adopsi e-government di era digitalisasi pelayanan publik*. Jurnal Teknologi Pemerintahan, 7(1), 15–28.
- Sri Mulatsih, D., Apriyanto, D., & Mardinata, I. (2023). *Partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa berbasis digital*. Jurnal Inovasi Sosial, 11(1), 102–114.
- Sucipto, A., Lestari, M., & Rodiyah, N. (2022). *Penerapan sistem informasi desa (SID) untuk peningkatan transparansi layanan publik*. Jurnal Transformasi Pemerintahan, 6(3), 88–99.
- Suryandari, A., Ramadani, S., & Ihsan, A. (2019). *Digitalisasi layanan publik melalui pengembangan smart city dan smart village di Indonesia*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(2), 35–47.
- Tohopi, A., & Hulinggi, M. (2023). *Peran akademisi dalam mendukung digitalisasi pemerintahan desa di Boalemo*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Unggul, 8(2), 56–67.
- Wuryan Andayani, T., Fransiska, D., & Rini, M. (2024). *Efektivitas implementasi e-government terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di pedesaan*. Jurnal Teknologi dan Inovasi Publik, 10(1), 21–33.